



TINJAUAN BUKU
POLITIK SEKSUALITAS DAN DINAMIKA HUMANISASI
SERTA *HIPERVISIBILITAS*: TINJAUAN BARAT

Hardi Alunaza

Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia
hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Anggi Putri

Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia
anggiputri@student.untan.ac.id

Mentari

Universitas Tanjungpura
mentari@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Tulisan ini merupakan kajian literatur mengenai politik seksualitas dan dinamika humanisasi dalam terminologi seks yang merupakan bentuk penegasan terkait keberadaan seksualitas yang beragam tetapi juga membutuhkan pengaturan dari berbagai perspektif. Hal ini didasarkan pada politik seksualitas yang sering kali digunakan sebagai analisis utama dan pengaruhnya terhadap rezim di dunia selatan yang dipengaruhi oleh ideologi liberal. Tulisan ini secara rinci terbagi ke dalam beberapa bagian dalam melihat dinamika politik seksualitas. Perspektif sosio-politik yakni menjelaskan mengenai gerakan yang berhasil menembus politik arus utama dengan kehadiran Queer yang cukup solid. Kedua, penyesuaian dan penggunaan kata Queer ke dalam praktek Kyrgyztani mengenai gender dan pembangkangan seksual. Serta pembahasan mengenai seksualitas pribumi atau masyarakat adat yang menolak penaklukan dan terjemahan. Seksualitas pribumi menentang kerangka kerja LGBT dan Queer kontemporer. Tulisan ini diakhiri dengan pandangan terkait kekerasan dan diskriminasi berdasarkan identitas gender dan juga orientasi seksual seseorang. Politik seksualitas mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi semakin global sejak pergantian abad ke dua puluh satu. Perluasan seksualitas global adalah upaya rumit yang dapat memberikan kebebasan dan mendatangkan penindasan. Namun didukung oleh proyek asing dan komunitas pendonor dengan dalih atas alasan kemanusiaan.

Kata Kunci: *Politik Seksualitas, Sosio-Politik, Kekerasan dan Diskriminasi Gender.*

PENDAHULUAN

Persoalan mengenai kelompok minoritas dan etnis tertentu termasuk diskriminasi di Indonesia dan juga dunia tidak akan pernah selesai. Sebab, tidak hanya di dunia tetapi

juga di Indonesia banyak kelompok yang merasa menjadi kelompok berbeda yang mengakui keberadaan mereka sebagai kaum minoritas¹. Kelompok yang dulu terlihat tabu bagi sebagian masyarakat Indonesia bahkan tidak diketahui, kini seolah menjadi biasa dan dipandang sebagai *lifestyle* di tengah masyarakat. Tentu ada pandangan berbeda dalam perspektif Barat dan Islam memandang hal ini. Seperti diskursus yang berbeda ketika menjelaskan fenomena ini di tengah masyarakat Indonesia yang sejatinya sebagian besar dan mayoritas beragama Islam.

Tulisan ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang melintasi batas politik, metodologis dan linguistik untuk mengeksplorasi kemustahilan terhadap penerjemahan seksualitas serta mengartikulasikan seksualitas ke dalam kata-kata. Fokus utama yang penulis kaji dalam buku ini adalah menerjemahkan seks dan lidah dalam Hubungan Internasional, dimana hal ini berkaitan dengan seksualitas global ataupun politik seksualitas lintas batas. Buku ini tersusun dari 10 bab dengan perincian yang membahas permasalahan tentang pembebasan seksual dengan tujuan melihat narasi global terhadap penegasan keberadaan seksualitas yang beragam akan tetapi juga memaksakan pengaturan eksternal. Pada awal pembahasan penulis memaparkan pembahasan tentang kehidupan tanpa nama dengan mengkontemplasikan gagasan tanpa nama sebagai emansipatoris. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dari “LGBT Boom” Jepang serta melihat posisinya dalam wacana Queer nasional dan global.

Penulis juga menyinggung pembahasan tentang seksualitas adat dengan mendahului kerangka LGBT global, penulis mengambil pendekatan linguistik untuk membuktikan bahwa keberagaman seksual telah menjadi norma secara historis. Pada pembahasan selanjutnya terdapat bahasan tentang bahasa hak-hak dan alternatif untuk gender dan seksualitas di Nepal kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang perjuangan untuk mendapat pengakuan seksualitas dengan gagasan yang membuat para ahli Queer terpaksa untuk memeriksa kembali gagasannya. Di dalam pembahasan pada buku ini juga terdapat bab yang paparannya berupa wawancara dengan sutradara film dokumenter yang membahas tentang homoseksualitas di Kurdistan Irak. Pembahasan dilanjutkan dengan paparan penulis yang menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pendekatan LGBT neoliberal di Bangladesh dan dilanjutkan dengan pembahasan

¹ Intan Kurnia, et al. 2020. Politik Seksualitas dan Keberadaan LGBT di Indonesia Terhadap Kebijakan Negara. *Journal of Public Policy and Administration* Silampari vol 2 (1). Hal: 1-10

mengenai Tajikistan yang menjadi medan dalam memperjuangkan hak-hak LGBT. Pembahasan ditutup dengan paparan yang mempertanyakan tentang kumodifikasi dari politik identitas seksual untuk memperlihatkan bagaimana gender dan seksualitas normatif dan non-normatif dapat menopang kekuasaan internasional.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dengan jenis penelitian berupa analisis buku. Proses pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan buku *Sexuality and Translation in World Politics* tulisan Caroline Cottet dan Manuella Lavinias Picq yang dianalisis dengan menggunakan teknis analisis dalam menemukan dan menjelaskan mengenai politik seksualitas dan dinamika humanisasi dalam perspektif Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Dalam Politik Seksualitas

Amar di dalam menggagas politik seksualitas sebagai analisis utama dan terobosannya tentang politik keamanan di bagian Selatan, sebab hal ini berpengaruh terhadap rezim di belahan dunia Selatan yang dipengaruhi oleh ideologi neoliberal, bentuk pemerintahan yang baru mulai berkembang dan mengarah kepada humanitarianisme militer². Maka dapat dikatakan bahwa politik seksualitas yang dimaksud adalah serangkaian dinamika humanisasi dan proses *hipervisibilisasi* dan bukan mempermasalahkan politik seksual yang secara konvensional dikonseptualisasikan melalui identitas minoritas, orientasi seksual, kesehatan reproduksi ataupun kerangka hak pribadi lainnya.

Saat ini telah banyak didapati istilah yang memperkenalkan jenis-jenis orientasi seksualitas seperti Queer, LGBT, Biseksual, Aseksual, Penseksual dan lain sebagainya³. LGBT adalah salah satu bentuk orientasi seksualitas yang banyak ditemui dalam politik Jepang. Jika seksualitas diterjemahkan dalam dunia politik, maka hal ini akan berkenaan

² Langlois, A. J. (2016) 'International Relations Theory and Global Sexuality Politics', *Politics*. SAGE Publications Inc., 36(4), pp. 385–399

³ Kompas (2020) *Berkenalan dengan Definisi Orientasi Seksual dan Jenis-jenisnya*. Available at: <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan-definisi-orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=all> (Accessed: 13 February 2021).

dengan masalah emansipasi, kolonisasi dan kedaulatan serta tindakan ini juga akan berhubungan dengan politik kekuasaan, imperialisme dan intervensi asing. Sebagaimana terjemahan yang merupakan proses pembangunan makna, politik seksualitas dalam penerjemahannya terus mengalami perubahan secara radikal. Maka dapat dikatakan bahwa terjemahan adalah suatu tindakan politik yang berupa pelanggaran, subversi dan juga perampasan.

Bab pertama dalam buku ini diawali dengan pemahaman akan suatu puisi yang dipaparkan pada baris pertama bab ini. Secara umum puisi ini dipahami oleh penulis sebagai penamaan non-normatif dan realitas dari keberadaan seseorang. Kehidupan dengan penamaan terkadang membuat seseorang merasa putus asa, dimana penamaan dapat dijadikan cara untuk menciptakan kelas, hierarki, menyalahkan dan lain sebagainya seperti pertanyaan seberapa gay, lesbian ataupun transgenderkah Anda? Penamaan membuat seseorang berada dalam beban stigma sebab mengharapkan suatu posisi dan pengakuan dalam politik, namun tanpa adanya penamaan dalam kehidupan juga belum menjamin kondisi seseorang dapat lebih baik. Penamaan gender dapat dikatakan telah diberikan kepada manusia sebelum mereka lahir. Terdapat banyak ketentuan yang telah diatur melalui gender tersebut, seperti anak perempuan lembut sedangkan anak laki-laki pemberani dan lain sebagainya. Tentu di dalam diri seseorang penamaan yang didapatkan tidak akan selalu cocok dengan jati dirinya sehingga banyak timbul orientasi gender yang beragam, namun dunia sosio-politik akan mengambil tindakan untuk menstigmatisasi seseorang akan hal tersebut.

Dari perspektif sosio-politik, identitas dapat bertahan melalui kinerja publik dengan mengklaim kembali nama-nama yang dapat menggambarkan diri seseorang secara fundamental. Seseorang harus menjadi terbuka dan bangga terhadap seksualitas dan identitas gender sebagai keharusan pribadi dan politik. Seperti halnya menjadi LGBTQI secara terbuka berarti ada dan dikenal. Nama merupakan klaim yang dapat menggambarkan seseorang secara individu dan bagaimana mereka di dunia. Nama yang didapat dari keanehan seseorang merupakan bentrokan tektonik dari norma-norma sosial dan keegoisan individu. Pada kenyataannya perubahan nama dan bahkan kata gantinya acap kali bertentangan langsung dengan suatu keharusan. Penulis juga menyatakan pendapat bahwa dibutuhkan pencerahan tenaga khusus agar nama-nama jenis kelamin tertentu tersebut dapat disingkirkan, sebab lembaga yang dimiliki penulis lebih memilih untuk melakukan patologi atau menghukum setiap orang yang merasa tidak puas dengan

ketetapan gender yang telah mereka dapatkan sejak lahir. Penulis menegaskan bahwa bukanlah kita harus hidup tanpa nama akan tetapi seseorang harus mampu melakukan praktek tanpa nama dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas dan gender yang mengakui ketidaksempurnaan, tidak cocok dan berbagai alasan lainnya.

Bab selanjutnya dalam buku ini merupakan tinjauan singkat dari wacana Queer di Jepang serta bagaimana keadaan dan terminologi LGBT Boom diikuti posisinya dalam wacana Queer tersebut baik di tingkat nasional ataupun global. Pada tahun 1970-an telah terdapat upaya yang dilakukan untuk memolitisasi wacana baru budaya Queer Jepang serta membentuk komunitas alternatif. Kemudian pada tahun 1990-an wacana politik LGBT yang lebih luas mulai terbentuk dan dikenal dengan sebutan “Boom Gay” yang secara langsung menunjukkan keberhasilan dari para pembela ataupun pendukung transgender di Jepang. Pada tahun 2003 mulai didapati politisi LGBT pertama yang terpilih di Jepang. Hingga pada tahun 2018 Jepang dapat dikatakan telah berhasil menembus politik arus utama dengan kehadiran Queer yang cukup solid. Pembahasan dalam bab ini kemudian membahas tentang terjemahan, penggunaan kata ataupun istilah LGBT yang cukup diperdebatkan di Jepang sebab adanya asumsi bahwa orang yang mengklaim dirinya LGBT dapat berisiko diasingkan dan gagal untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Praktek Politik Seksualitas dan Kaum Minoritas di Barat

Pada bab ketiga penulis berfokus akan pembahasan tentang penerjemahan, penyesuaian dan penggunaan kata Queer ke dalam praktek Kyrgyztani mengenai gender dan pembangkangan seksual. Penulis membagi bab ini menjadi tiga bagian. Pertama, dengan fokus permasalahan LGBT penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang yang cukup penting untuk politik ataupun masyarakat Kyrgyzstan mengenai LGBT tersebut. Bagian kedua terdapat pembahasan mengenai beberapa artian dari kata Queer diikuti perdebatan-perdebatan yang muncul terkait penggunaan kata tersebut di ruang pasca-Soviet. Bagian ketiga menjelaskan perbandingan dari dua terjemahan kata Queer untuk memperlihatkan bagaimana persaingan yang terjadi dalam pendekatan-pendekatan yang berusaha menerjemahkan kata Queer di ruang pasca-Soviet. Penggunaan kata Queer pada dasarnya memiliki kemiripan yang cukup signifikan dalam seluruh bahasa, perbedaannya terdapat dalam hubungan antara suatu korespondensi dengan korespondensi lainnya tentang kesetaraan dan identitas. Maka dapat dikatakan

bahwa penerjemahan kata Queer ke dalam bahasa Rusia Kyrgyzstan ada dan akan terus diterjemahkan serta penulis mengatakan bahwa tidak ada terjemahan yang “benar”.

Berikutnya terdapat pembahasan mengenai seksualitas pribumi atau masyarakat adat yang menolak penaklukan dan terjemahan. Seksualitas pribumi menentang kerangka kerja LGBT dan Queer kontemporer. Masyarakat Zapotec menyebutnya sebagai Muxe yaitu gender ketiga, dimana Muxe ini menolak untuk diartikan sebagai waria sehingga tidak dapat direduksi ke dalam kategori LGBT. Secara tradisional Muxe diyakini sebagai berkah dari para dewa, bahkan dalam masyarakat adat di Andes terdapat dewa gunung Jaguar yang menjadi pelindung orang-orang dengan dua jenis kelamin. Di lembah Mississippi terdapat istilah *Ikoueta* yang diartikan sebagai laki-laki yang mengadopsi peran gender dan diyakini bahwa mereka suci dan segala keputusan yang akan diambil terlebih dahulu diputuskan melalui nasihat mereka. Bagi banyak masyarakat di seluruh dunia keberagaman seksualitas dan berbagai gender adalah hal yang sudah ada sebelum pengenalan Barat yang kemudian dihapus oleh kolonial dengan kekerasan, akan tetapi masyarakat adat yang cukup gigih melakukan penolakan sehingga seksualitas pribumi dapat bangkit kembali. Seksualitas pribumi dianggap penting di luar seksualitas politik sebab mereka dapat memperbesar imajinasi politik dan tidak sebatas kosa kata seksual saja. Bagi masyarakat adat seksualitas adalah suatu proyek teoritis yang dapat melampaui kategorisasi dan batas-batas politik.

Bab kelima memuat pembahasan tentang perjuangan minoritas seksual di Nepal. Nepal memiliki kemajuan akan tindakannya terhadap transgender, dimana telah terdapat hukum yang mengatur hak-hak yang dapat diterima oleh transgender ataupun orang-orang dengan seksualitas alternatif. “Bahasa hak” yang telah didapat oleh kaum ini dapat diasosiasikan dan diidentifikasi sehingga mereka dapat bersatu sebagai kelompok dengan kebutuhan dan tuntutan untuk diperjuangkan. Akan tetapi dalam adat istiadat di Nepal golongan ini tetap dianggap merugikan dan sering terasingkan yang kemudian membuat nasib dari minoritas seksual ini terombang ambing dan hidup dengan kecanggungan terhadap satu sisi dan sisi lainnya.

Bab keenam dalam buku ini, secara umum memaparkan pembahasan yang berfokus kepada Aseksualitas dan bagaimana internet dapat digunakan untuk membantu komunitas seksual dapat menolak definisi atau terjemahan yang dipaksakan terhadap mereka diikuti dengan konsekuensi materialnya. Aseksualitas diartikan sebagai individu yang tidak memiliki ketertarikan akan hasrat seksual dan tidak akan pernah

merasakannya. Individu ini dapat membentuk narasi akan identitasnya dengan melawan narasi terkini melalui narasi baru yang dibentuknya. Komunitas ini memiliki tujuan bukan untuk disembuhkan melainkan untuk mendapat pengakuan yang sah sebagai salah satu orientasi seksualitas seperti bentuk-bentuk orientasi seksualitas lainnya.

Selanjutnya pada bab ketujuh, pembahasan merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Diako Yazdani yang merupakan seorang sutradara dengan salah satu filmnya yang dilaporkan berisi tentang politik homoseksualitas. Film ini membahas tentang seksualitas yang merupakan subjek tabu meskipun harus menjadi sentral dalam politik pembebasan. Bab ini secara keseluruhan membahas tentang interaksi, tindakan ataupun perlakuan dari orang-orang Kurdisian terhadap komunitas LGBT serta gambaran dari kehidupan mereka masing-masing di Kurdi sebagaimana yang juga terdapat di dalam film yang digarap oleh Diako Yazdani tersebut.

Pembahasan dilanjutkan dengan paparan mengenai segala kejadian yang bersinggungan dengan seksualitas di Bangladesh termasuk instrumen hukum yang mengatur identitas, pengakuan, hak, norma-norma dan segala hal yang berhubungan dengan seksualitas tersebut. Pembahasan meninjau kebutuhan yang jelas untuk dekolonisasi dalam konteks khusus Bangladesh dan secara lebih luas di Asia Selatan. Hal ini dilakukan untuk memajukan hak-hak Queer di negara ini secara aman dan sah. Penulis meyakini bahwa terdapat keanehan dalam sejarah tentang penindasan melalui kolonialisme dan kritik terhadap model neoliberal Barat mengenai pembebasan LGBTQ+ hanyalah sebagai implementasi dari neo-kolonialisme.

Proyek Asing dan Komunitas Pendonor atas Alasan Kemanusiaan

Kemudian pada bab sembilan pembahasan terbagi ke dalam tiga bagian dengan mempertanyakan niat baik yang dilakukan oleh komunitas donor, proyek-proyek asing dengan tujuan emansipasi kaum LGBT, promosi toleransi dan bahkan pengakuan publik atas hak-hak sipil kaum LGBT di Tajikistan yang memiliki efek berbanding terbalik di negara ini. Bagian awal dalam bab ini merupakan pembahasan singkat dari kerangka historis dan hukum menyangkut permasalahan LGBT di Tajikistan kontemporer, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang kedatangan Soviet yang memberi pengaruh dan paralel dengan Rusia paska-Soviet di Tajikistan, lalu diakhiri dengan paparan mengenai asumsi umum terhadap seksualitas sesuai dengan kepercayaan populer dan tatanan sosial dengan memanfaatkan wawancara yang dilakukan bersama para pemimpin sosial di Tajikistan. Terlihat bahwa bab ini menyentuh suatu hubungan yang

bermasalah dengan norma-norma Internasional dan praktek lokal, serta penempatan secara langsung norma-norma yang dipromosikan oleh donor Internasional dengan kepercayaan yang populer di Tajikistan. Penulis meyakini bahwa donor mengambil pendekatan yang salah dalam mempromosikan hak LGBT, diikuti dengan reaksi publik yang cukup merugikan terkait dengan permasalahan tersebut.

Pembahasan ditutup dengan paparan yang mempertanyakan kumodifikasi politik identitas seksual dengan menekankan tanggapan dari pencerita, pendapat, ataupun kesan akan peristiwa ataupun kejadian yang dialami oleh kaum Queer. Di dalam bab ini terdapat paparan tentang Queer sublim yang dikomodifikasi oleh Amerika sehingga selamat dari penjara politik Iran. Pembahasan mengenai LGBTQIA di Iran dan negara-negara berkembang lainnya dapat dikatakan telah menjadi pusat perkembangan maskulinitas berorientasi pasar baru kemudian menyebar ke laki-laki heteroseksual sehingga berkontribusi dalam pembentukan neo-imperialisme di wilayah tersebut. Queer dipertanyakan setelah adanya teori akan kata ini, sekiranya Queer tersebut dapat merebut seksualitas dari jalan buntu politik seksualitas sehingga tidak bisa diremehkan seperti proyek neo-imperialisme yang sedang diimplementasikan di Timur Tengah, dimana mereka tidak memasukkan Queer ke dalam konteks anti normativitas queer yang ditangkap sendiri atas nama pemerintahan institusi sosial, budaya, politik ataupun ekonomi.

Maraknya tuntutan yang dilakukan oleh kaum LGBT terhadap hak-haknya tidak terlepas dari pencetusan Resolusi oleh PBB yang merilis laporan pertamanya mengenai hak-hak LGBT pada tahun 2011, dimana PBB menuntut diakhirinya pengabaian yang dilakukan oleh pemerintahan dan jajarannya terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan identitas gender dan juga orientasi seksual seseorang. Dari resolusi ini maka dapat dikatakan bahwa PBB memaksa dan mendesak setiap negara untuk melakukan perlindungan dan hukum terhadap hak-hak dari kaum LGBT di negaranya sehingga timbullah isu akan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilanggar berdasarkan gender ataupun orientasi seksual. Di Indonesia populasi LGBT dapat dikatakan berada pada urutan atas yaitu di peringkat kelima setelah Amerika, China, Eropa dan India dengan jumlah populasi yang mencapai angka 7,5 juta jiwa⁴.

⁴ SANTOSO, M. B. (2016) 'LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Share : Social Work Journal*. Universitas Padjadjaran, 6(2), p. 220

Tidak hanya di Tajikistan, Irak, Bangladesh dan negara lainnya seperti pembahasan dalam buku ini, di Indonesia juga banyak terdapat kejadian ataupun peristiwa mengenai seksualitas. Di antaranya adalah gerakan kampanye yang secara langsung juga mendapatkan dukungan dari pegiat feminisme dan akademis dalam menuntut dan memperjuangkan legalitas LGBT di Indonesia. LGBT telah bergerak dari ranah politik hingga ke bidang teologi di Indonesia, dapat dilihat dalam ranah politik komunitas LGBT serta pendukungnya berusaha untuk mewujudkan undang-undang agar pernikahan sesama jenis dapat di legalkan di Indonesia, kemudian di bidang teologi dapat dilihat dari kampanye ataupun tindakan yang membongkar tempat keagamaan dengan alasan adanya pemaksaan secara tidak langsung dengan pilihan terhadap heteroseksual sebagai satu-satunya orientasi seksualitas yang dapat dipilih serta telah berlangsung cukup lama di Indonesia⁵.

SIMPULAN

Seksualitas ataupun politik seksualitas mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi semakin global sejak pergantian abad ke dua puluh satu. Perluasan seksualitas global ini adalah upaya rumit yang dapat memberikan kebebasan dan mendatangkan penindasan. Keberlangsungan politik LGBT dalam mengategorikan seksualitas ke dalam istilah positifis dengan tujuan untuk mengadvokasi hak-hak hukum memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan Queer, dimana Queer mengambil suatu pendekatan yang membuka kemungkinan besar untuk mengundurkan diri dari seksualitas dan bahkan LGBT monolik. Secara inheren kaum Queer dapat dikatakan bersifat transgresif, menentang determinisme politik identitas LGBT dan memberikan ruang yang cukup istimewa untuk terjemahan.

Buku ini memiliki keunikan struktur tersendiri, dimana dalam setiap bab terdapat pendahuluan, isi, kesimpulan serta daftar pustaka masing-masing. Buku ini dapat memberikan wawasan baru dan transformatif dalam suatu disiplin ilmu. Paparan dalam

⁵ Saleh, G. and Arif, M. (2017) *Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT*, *Jurnal Komunikasi Global*. Available at: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9319> (Accessed: 13 February 2021).

buku ini banyak memuat kisah yang diambil dari pengalaman seseorang ataupun penulis serta narasi-narasi lain yang membuat pembahasan di buku ini tidak terlalu dalam bentuk formal ataupun berbasa akademis. Menilik pembahasan tentang politik seksualitas, hal ini mungkin dapat lebih diintegrasikan lagi dengan teori-teori HI oleh para peneliti dengan menggunakan ide, pendekatan dan instrumen lainnya dalam kajian Hubungan Internasional. Terlihat bahwa dalam buku ini penjelasan antara bab tidak memiliki korelasi yang cukup erat, pembahasan masing-masing bab berdiri sendiri dengan bahasan yang cukup berbeda-beda namun masih dalam satu kontekstual. Kekurangan dalam buku ini adalah bahwa cukup minim ditemui pembahasan yang menjelaskan korelasi antara seksualitas yang dibahas dalam setiap bab dengan politik sebagaimana judul dan tujuan yang disebutkan penulis di pembukaan buku ini. Pembahasan dalam buku ini terlalu mengambang sehingga pembaca sedikit kesulitan untuk menemukan fokus yang dibahas dan memahami maksud dari tulisan yang dipaparkan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompas (2020) *Berkenalan dengan Definisi Orientasi Seksual dan Jenis-jenisnya*. Available at: <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/08/104459120/berkenalan-dengan-definisi-orientasi-seksual-dan-jenis-jenisnya?page=all> (Accessed: 13 February 2021).
- Langlois, A. J. (2016) 'International Relations Theory and Global Sexuality Politics', *Politics*. SAGE Publications Inc., 36(4), pp. 385–399. doi: 10.1111/1467-9256.12108.
- Saleh, G. and Arif, M. (2017) *Rekayasa Sosial dalam Fenomena Save LGBT*, *Jurnal Komunikasi Global*. Available at: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JKG/article/view/9319> (Accessed: 13 February 2021).
- SANTOSO, M. B. (2016) 'LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Share : Social Work Journal*. Universitas Padjadjaran, 6(2), p. 220. doi: 10.24198/share.v6i2.13206.
- Saputri, Intan Kurnia et al. (2020). Politik Seksualitas dan Keberadaan LGBT di Indonesia Terhadap Kebijakan Negara. *Journal of Public Policy and Administration* Vol 2 (1). P: 1-10.